



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**UNIT KERJA** : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AINUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 415062

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 685.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/72 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/60 m2 di PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 172.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO BEBEK Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BEBEK/B5D A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 55.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 11.671.780

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 923.671.780

**III. HUTANG**

Rp. 163.264.816

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 760.406.964

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**UNIT KERJA** : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MUNADIAH AS'AD**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **462763**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. **645.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/70 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/64 m2 di SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 220 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 330 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 5000 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 5648 m2 di SIDENRENG RAPPANG, WARISAN Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. **80.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G/MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, SUZUKI BLSOLO 125 SCD SHOGUN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. **50.500.000**

**D. SURAT BERTHARGA**

Rp. **---**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. **67.949.226**

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. **---**

**Sub Total**

Rp. **843.449.226**

**III. HUTANG**

Rp. **95.891.066**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

747.558.160

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**UNIT KERJA** : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DELTA DATUTASIK
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 887921

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>510.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/88 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>434.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G M/T / MINIBUS Tahun 2018, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
3. LAINNYA, POLYGON URBANO 5 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
4. LAINNYA, WIM CYCLE SEPEDA ANAK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
5. LAINNYA, WIM CYCLE SEPEDA ANAK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>155.026.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>234.711.990</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.333.737.990</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>288.097.664</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.045.640.326</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : M. MUJAHID SHALEH  
NIK : 7324040503830006  
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
Sub Unit Kerja : BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM,  
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR  
Jabatan : KEPALA BIDANG  
Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat  
Tanggal Kirim : 28 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.